

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN DALAM KEGIATAN PRAREKRUITMEN DAN SELEKSI PERSONEL POLRI DI POLDA PAPUA

**Yudianto A. Nugroho**  
**Politeknik STIA LAN Jakarta**  
yudianto.a.n@gmail.com

### *Abstract*

*Papuan National Police personnel who have strong national character can eliminate acts of separatism and prevent anarchic conflicts in ways that are appropriate to the culture and character of the Papuan people but remain within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to analyze the results of the application of a special guidance and training system prior to the recruitment and selection of Polri personnel in an effort to implement the affirmative policy of Indigenous Papuans, which can strengthen national character into prospective Polri Education participants in Papua so that when they graduate as members of the National Police. The research used is qualitative descriptive in a way that describes the process of recruiting members of the National Police at the Papua Regional Police who must accommodate affirmative policies but still have a strong national perspective. The type of research used is to conduct a literature search that is used to collect information and data with the help of various materials such as documents, books, articles, journals and so on. The subject of this research is the pattern of coaching and training prior to the implementation of the education for the formation of a National Police Officer. This study uses the content analysis method to obtain valid inferences and can be re-examined based on the context. The results of the research show that Polri personnel from OAP who have national character and nationalism must carry out coaching and training activities with National Character Education material for prospective National Police Officers selection participants*

**Keywords:** *National Character Education, Recruitment, Polri Personnel*

### **Abstrak**

Personel Polri asli Papua yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat dapat menghilangkan aksi separatisme serta mencegah konflik-konflik anarkis dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat Papua namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil penerapan sistem pembinaan dan pelatihan khusus sebelum kegiatan rekrutmen dan seleksi personil Polri dalam upaya mengimplementasi kebijakan afirmasi Orang Asli Papua yang dapat menguatkan karakter kebangsaan kepada calon peserta Pendidikan Polri di Papua sehingga pada saat lulus menjadi anggota Polri. Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan cara menggambarkan proses kegiatan rekrutmen anggota Polri di Polda Papua yang harus mengakomodir kebijakan afirmasi namun tetap memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Jenis penelitian yang dipakai adalah melakukan penelusuran pustaka yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material seperti dokumen, buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Subyek penelitian ini adalah pola pembinaan dan pelatihan sebelum pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara Polri. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Hasil penelitian menghasilkan bahwa personel Polri dari OAP yang memiliki karakter kebangsaan dan nasionalisme harus dilakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan dengan materi Pendidikan Karakter Kebangsaan kepada calon peserta seleksi Bintara Polri

**Kata Kunci:** Pendidikan Karakter Kebangsaan, Rekrutmen, Personil Polri

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri dari beragam suku dan ras pernah mengalami konflik internal yang membahayakan kesatuan negara, namun berkat ketangguhan dan nasionalisme semua elemen bangsa Indonesia, maka konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui meja perundingan. Namun saat ini masih terdapat sebuah permasalahan konflik internal yang terjadi di Provinsi Papua. Konflik internal ini berupa

sebuah gerakan makar yang menuntut pemisahan Papua sebagai sebuah negara merdeka, sebagaimana pernah terjadi pada tahun pada Timor Timur, bekas provinsi di negara Indonesia yang sejak tanggal 20 Mei 2002 resmi berpisah dan berdiri sebagai negara Timor Leste. Terlepasnya provinsi Timor Timur ini jelas menjadi sebuah pelajaran pahit yang selalu diingat dan diantisipasi oleh bangsa Indonesia agar tidak terjadi lagi di provinsi lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dwaa, Noach Hendrik Daud., 2020).

Konflik internal di Provinsi Papua saat ini telah berkembang menjadi gerakan separatisme. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belah dalam suatu golongan (bangsa). Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius). (Harianja, Ayunita, 2020)

Tindakan hukum oleh Pemerintah Indonesia terhadap gerakan separatisme di Indonesia tidak mudah dilaksanakan, hal dikarenakan eksistensi gerakan separatis seludibiayai, dan didukung kekuatan asing. Dukungan asing itu diperlihatkan dalam bentuk dukungan dana dan dukungan politik yang dinyatakan dalam forum internasional seperti sidang PBB seperti yang pernah dilakukan oleh Negara Vanuatu yang meminta diadakan referendum di Papua (Dwaa, Noach Hendrik Daud., 2020). Hal ini mengakibatkan adanya implikasi internasional kepada gerakan separatism di Indonesia yang ingin mendirikan negara. Selain dukungan internasional di atas, secara internal dalam negerikemampuan deteksi dini dan pencegahan awal separatism yang dimiliki Badan Intelejen Nasional dan TNI Polri juga masih lemah. Aksi-aksi separatisme dan konflik anarkis yang terakhir terjadi di Papua pada bulan Agustus tahun 2019, adalah salah satu bukti kelambatan antisipasi dan minimnya upaya pencegahan serta penanganan awal potensi separatisme oleh badan-badan intelejen di Indonesia (Pravitri Retno, 2019).

Gerakan separatisme di Papua terbilang cukup banyak, dan tidak semua disebut dengan istilah umum Organisasi Papua Merdeka (OPM), seperti yang banyak dikenal. Mereka ada dibawah beberapa bendera, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), dll. Namun secara umum saat ini gerakan-gerakan tersebut dikelompokkan menjadi Kelompok Separatis Papua (KSP), meskipun jumlah pendukungnya kecil mereka tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di Papua. Hingga kini masih ada upaya dari GSP di luar negeri untuk menggagalkan dukungan politik masyarakat internasional bagi perjuangannya mewujudkan kemerdekaan Papua (Sofyan, FS. dan D. Sundawa., 2015).

Pemerintah Indonesia terus berusaha mengeliminasi permasalahan separatis di Papua, baik melalui lobi-lobi di luar negeri maupun pendekatan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Papua. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 yang memberikan otonomi khusus kepada wilayah Irian Jaya serta mengubah namanya menjadi Papua. Otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua menurut pasal 1 huruf (a) Undang-Undang No. 21 tahun 2001 adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua (Mahifal, 2015).

Dalam penerapan Otsus ini juga terkandung maksud untuk memberi kontribusi positif dalam penanganan kasus separatism di Papua salah satunya melalui bidang pendidikan masyarakat orang asli Papua (OAP) yaitu dengan pembuatan kebijakan afirmasi dengan menerapkan kuota bagi orang asli Papua dalam seleksi penerimaan calon polisi,

sebagaimana telah dituliskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Pasal 49 ayat (1) UU Otsus Papua menyatakan "Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua (Pemerintah Republik Indonesia., 2001).

Kebijakan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Polri dalam hal perekrutan anggota Polri berkaitan dengan paham eksklusivitas yang masih kuat berakar dalam wawasan pemahaman masyarakat asli Papua. Pengertian eksklusif dalam sosiologi adalah masyarakat yang merasa takut terhadap budaya lain karena diyakini budaya tersebut memiliki pengaruh untuk merusak budayanya.(Kun Maryati dan Juju Suryawati:2006). Harus ada upaya pembentukan profil personil Polri dari OAP yang bisa menjadi agen perubahan wawasan pemahaman masyarakat suku Papua agar tidak lagi berpaham/mindset eksklusif dan apabila berhasil merubah mindset tersebut sekaligus dapat meredam berkembangnya aksi separatism di Papua yang menjadi tugas Polri (Harianja, Ayunita., 2020).

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam hal penanganan separatism di Papua maka Polri menjadi garda terdepan dalam hal penegakan hukum dan penjagaan keamanan. Dalam menjalankan tugas berat tersebut tentunya dibutuhkan profil anggota Polri yang profesional dan modern. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, dan dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, maka organisasi Polri perlu membuat perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia organisasi Polri, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, organisasi tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan terutama dalam menanggulangi permasalahan separatism di Papua (Dwaa, Noach Hendrik Daud., 2020).

Berkaitan dengan perencanaan SDM Polri di Polda Papua maka Polri kemudian melakukan langkah-langkah dalam rangka implementasi kebijakan afirmasi di dalam perekrutan anggota Polri di Papua. Dalam upaya meredam aksi separatism di Papua maka dalam implementasi kebijakan afirmasi tersebut harus dibuat suatu inovasi sistem rekrutmen yang berwawasan kebangsaan agar paham eksklusivitas yang berkembang di dalam pemikiran masyarakat asli Papua tidak makin berkembang terutama bagi personil Polri asli Papua. (Nuryanti, 2014) menyebutkan wawasan kebangsaan melahirkan suatu paham kebangsaan atau nasionalisme yang mencerminkan pikiran-pikiran yang bersifat nasional. Setiap bangsa seharusnya memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional. Melalui wawasan kebangsaan, masyarakat Indonesia dapat merasakan cinta terhadap negara Indonesia.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Depinus Tabuni, Patar Rumapea, William A. Areros yang berjudul Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Studi Kasus Tentang Pelayanan Publik Bidang Pendidikan) Di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua menyatakan Penelitian ini menggunakan desain kualitatif yang difokuskan pada pelaksana komunikasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberlakuan Otonomi khusus Papua yang ditetapkan dengan UU nomor 21 tahun 2001, telah memberikan peran yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk perumusan kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat, namun dalam implementasi masih terdapat masalah dan masih belum mencapai tujuan daripada Otsus karena masih banyak

masyarakat yang belum merasakan keberhasilan kesejahteraan dalam bidang pendidikan dan segala bidang pembangunan (Tabuni, Depinus, Rumapea, Patar, & Areros, 2018).

Kemudian dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Noach Hendrik Daud Dwaa (2020) yang berjudul *Implementasi Affirmative Action Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Bintara Polri Di Polda Papua 2019*. Metode penelitian menggunakan metode post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tindakan afirmatif dalam rekrutmen dan seleksi calon anggota Polri dan PNS di Papua Polda pun masih belum maksimal, dimana rekrutmen dan seleksi anggota Polri di Polda Papua lebih banyak merekrut orang Non Asli Papua mengalahkan OAP atau Ras Melanesia dan kemudian agar dapat diterapkan merit system yang bertujuan meningkatkan motivasi OAP agar mau bergabung sebagai calon Bintara secara optimal dikarenakan seleksi dengan merit system diharapkan meminimalisir pembentukan kelompok dalam kelompok yang merasa didiskriminasi dari organisasi berdasarkan kemampuan mereka, atau berkaitan dengan kelompok/ras tertentu (Dwaa, Noach Hendrik Daud., 2020).

Dalam upaya mengimplementasi kebijakan afirmasi dalam rekrutmen Polri di Papua maka harus dibuat sistem rekrutmen dan sistem pendidikan khusus yang dapat menguatkan karakter kebangsaan kepada peserta Pendidikan Polri di Papua sehingga pada saat lulus menjadi anggota Polri, mereka bisa menjadi personel Polri asli Papua yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat sehingga bisa meredam dan menghilangkan aksi separatism serta mencegah konflik-konflik anarkis dengan cara- cara yang sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat Papua namun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang mejadi rumusan masalah tulisan ini adalah: “Bagaimana Pola Rekrutmen Polri yang mengakomodir implementasi kebijakan afirmasi dan sekaligus menguatkan karakter kebangsaan para peserta pendidikan Polri di Polda Papua.”

## KAJIAN LITERATUR

### Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah proses untuk menetapkan strategi memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa mendatang. *Employment planning* adalah *process of determining an organization's human resource need*. Perencanaan sumber daya manusia diartikan sebagai cara untuk mencoba menetapkan keperluan tenaga kerja untuk suatu periode tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan caracara tertentu. Perencanaan ini dimaksudkan agar organisasi terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan maupun kelebihan sumber daya manusia pada saat kurang dibutuhkan (Siagian, Sondang P, 2012).

Menurut Miller Burack dan Maryann, bahwa perencanaan SDM ada 4 (empat) langkah pokok yaitu (1) Perencanaan untuk kebutuhan masa depan, hal ini sangat penting karena mencakup beberapa hal yang harus diperhatikan seperti jumlah pegawai dan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan serta jangka waktu kebutuhan pegawai tersebut. (2) Perencanaan untuk keseimbangan masa depan, harus dianalisis tentang berapa jumlah pegawai yang tersedia dan yang dibutuhkan agar rencana kebutuhan pegawai lebih terarah. Adapun yang perlu diperhatikan adalah jumlah pegawai yang ada maupun yang pensiun, jumlah lowongan dan jumlah pegawai yang diperlukan. (3) Perencanaan untuk perekrutan atau seleksi, menyangkut beberapa hal, yaitu pengumuman akan kebutuhan, jumlah pegawai yang diinginkan, penyaringan dan menarik pegawai yang dibutuhkan. (4) Perencanaan untuk pengembangan, akan memperhatikan pendidikan dan latihan, pergeseran atau mutasi serta promosi dan pengisian bagian-bagian yang memerlukan tenaga ahli, berpengalaman, sehingga cukup kapabel.

## Rekrutmen

Rekrutmen adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Proses untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas guna bekerja pada perusahaan atau instansi. Proses rekrutmen biasanya diawali dari proses seleksi. Gatewood dan Field menyatakan bahwa seleksi adalah proses pengumpulan dan evaluasi informasi tentang individu yang memperoleh tawaran pekerjaan (Rivai, Veithzal, 2016).

Seleksi adalah berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang akan ditolak. Proses seleksi dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan terhadap lamaran tersebut. Seleksi dilaksanakan tidak saja untuk penerimaan karyawan baru saja akan tetapi seleksi ini dapat dilakukan untuk pengembangan dan penerimaan karena adanya peluang jabatan. Untuk memperoleh dan mendapatkan peluang jabatan tersebut maka perlu dilakukan melalui seleksi yang obyektif untuk dapat diperoleh pegawai yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Proses rekrutmen sebaiknya juga sesuai prosedur dan dilakukan secara transparan terbebas dari KKN sehingga bisa diperoleh pegawai yang berdedikasi (Baedhowi, 2017).

Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Proses ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, *testing*, wawancara, ujian fisik. Dalam proses seleksi itu dipakai berbagai macam jenis dalam mengevaluasi persyaratan dan terutama untuk *testing*. Ada dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi ini, yaitu reliabilitas dan validitas (Rivai, Veithzal, 2016).

## Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang terhadap kebangsaan. Bangsa Indonesia menempatkan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sofyan dan Sundawa menambahkan pada hakikatnya wawasan kebangsaan mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dalam persaingan dunia yang globalistik tanpa harus kehilangan akar budaya dan nilai-nilai dasar Pancasila. Wawasan kebangsaan melahirkan suatu paham kebangsaan atau nasionalisme yang mencerminkan pikiran-pikiran yang bersifat nasional. Setiap bangsa seharusnya memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional. Melalui wawasan kebangsaan, masyarakat Indonesia dapat merasakan cinta terhadap negara Indonesia (Nuryanti, 2014).

Perlunya pemahaman wawasan kebangsaan yang dapat dilakukan melalui diklat. Masyarakat dilibatkan dalam diklat tentang wawasan kebangsaan dengan tujuan agar semua komponen warga negara Indonesia mengenal batas-batas wilayah laut atau perairan, darat, dan udara Indonesia. Melalui pemahaman yang kuat tentang batas-batas teritorial Indonesia ini maka masyarakat Indonesia akan menjaga dari pengaruh pihak asing yang ingin menguasai Indonesia. Unsur wawasan kebangsaan terdiri dari tiga hal, yaitu paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Wawasan kebangsaan penting untuk dikembangkan, karena rasa kebangsaan sebagai manifestasi dari rasa cinta pada tanah air yang dapat membangkitkan kesadaran berarti dan bernilainya rasa kesatuan dan persatuan bangsa (Lukum, Roni, 2020).

## **Pendidikan Karakter**

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 17 kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Sedangkan menurut Koesoema pendidikan karakter merupakan nilai-nilai dasar yang harus dihayati jika sebuah masyarakat mau hidup dan bekerja sama secara damai. Nilai-nilai seperti kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang lain, tanggung jawab pribadi, perasaan senasib, penderitaan, pemecahan konflik secara damai, merupakan nilai-nilai yang semestinya diutamakan dalam pendidikan karakter (Kemendiknas, 2015). Sasaran Pendidikan Karakter “Pendidikan karakter mempunyai sasaran kepribadian siswa, khususnya unsur karakter atau watak yang mengandung hati nurani (*conscience*) sebagai kesadaran diri (*consciousness*) untuk berbuat kebajikan (*virtue*) (Kemendiknas, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan cara menggambarkan proses kegiatan rekrutmen anggota Polri di Polda Papua yang harus mengakomodir kebijakan afirmasi namun tetap memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Jenis penelitian yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini adalah Studi Pustaka. Penelitian akan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran pustaka yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material seperti dokumen, buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Variabel pada penelitian ini adalah pola pembinaan dan pelatihan sebelum pelaksanaan seleksi Bintara Polri.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, maupun artikel atau jurnal yang berasal dari penelusuran google scholar. Instrumen penelitian kepustakaan ini adalah klasifikasi bahan penelitian menggunakan tabel berdasarkan nama penulis, tahun dan judul jurnal, tujuan, teori, metode penulisan, hasil penelitian dan kesimpulan, format catatan penelitian, serta alat-alat penunjang yang digunakan berupa buku.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini berupa metode analisis isi. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis data akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilih berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah proses untuk menetapkan strategi memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa mendatang. Sejalan dengan pendapat tersebut. Problematika di daerah Papua menjadi catatan khusus bagi Mabes Polri. Melihat beratnya territorial Kawasan Papua, perlu anggota Polri yang berkualifikasi khusus oleh sebab itu SSDM Mabes Polri berupaya membangun karakter putra Papua menjadi insan Polri yang unggul serta memiliki jatidiri bangsa Indonesia yang cinta NKRI dengan konsep pendidikan karakter jati diri bangsa Indonesia yang mengedepankan rasa wawasan karsa kebangsaan Indonesia Raya yang bertujuan mengubah karakter yang anti NKRI yang menjadi karakter cinta NKRI yang dinamakan program Pembinaan dan Pelatihan (Binlat) Pra Bintara Noken Polri dengan tujuan pemberian pembekalan Pendidikan Karakter Kebangsaan bagi orang asli Papua (OAP) yang akan menjadi calon peserta seleksi bintangara Polri .

Kegiatan rekrutmen bintanga Polri dari OAP berawal dari fakta bahwa dalam rekrutmen Polri tahun 2019, jumlah OAP atau Ras Melanesia yang lulus seleksi lebih sedikit dibandingkan Non-OAP sebagaimana data hasil penelitian yang dilakukan oleh Noach Hendrik Daud Dwaa yang berjudul *Implementasi Affirmative Action Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Bintanga Polri Di Polda Papua 2019* dengan tabel sbb :

Tabel 1. Minat Pendaftar dan Kelulusan Bintanga Polri Tahun 2019

No	Th.	Jumlah Pendaftar	Masuk Pendidikan/Lolos Seleksi		
			Non-OAP	OAP	Jumlah
1	2019	2.972	145	112	257

Sumber. Data Biro SDM Polda Provinsi Papua (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat jumlah pendaftar seleksi Bintanga di Polda Papua lebih banyak Non-OAP dibandingkan dengan OAP dengan selisih 33 orang. Fakta ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan di dalam komunitas masyarakat asli Papua. Kapolri kemudian memerintahkan ASSDM Kapolri untuk menindaklanjuti surat tersebut dan kemudian SSDM Polri mengadakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan mengundang Kapolda Papua dan MRP (Majelis Rakyat Papua) pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan rekomendasi (1) Melaksanakan Kanalisasi pada setiap Tahapan Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri untuk OAP & Non Orang Asli Papua (Non OAP) Di Panda Papua & Papua Barat. (2) Agar Polda Papua diberikan Otoritas meluluskan OAP Sebanyak 25% dengan ketentuan yaitu memenuhi standar minimal yang telah ditentukan

Mabes Polri kemudian mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/2513/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 ttg penyelenggaraan rekrutmen pra Bintang Noken Polri dlm penerimaan Bintang Polri T.A. 2020. Keputusan ini menguatkan program perekrutan Bintang Polri dari OAP yang merupakan inovasi dalam kegiatan rekrutmen Polri dalam rangka pemenuhan kebutuhan personil Polri dari OAP sebagaimana hasil rekomendasi kegiatan FGD sebelumnya. Program ini merupakan program baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya yaitu program pra rekrutmen dengan memberikan pelatihan dan pembinaan tentang karakter kebangsaan kepada calon peserta didik Polri dari OAP sehingga dapat lulus untuk menjadi personil Polri di Polda Papua dengan karakter kebangsaan yang kuat. Keputusan Kapolri ini juga menjadi pedoman dalam program rekrutmen bintanga Polri di Polda Papua sehingga dapat menjamin lulusnya OAP menjadi anggota bintanga Polri sesuai kuota yang telah ditentukan.

Sebagaimana telah disampaikan dalam kerangka konseptual yang terdahulu, yang menyatakan bahwa setiap organisasi sukses tidaknya tergantung pada apakah organisasi tersebut memiliki SDM yang berkualitas, berkemampuan dan memiliki keahlian, dan apakah SDM tersebut telah dikelola dengan baik. Dalam kerangka tersebut, kemudian dibuat perencanaan strategis yang memberikan rincian tentang visi, misi dan arah organisasi, tentang sasaran/tujuan organisasi. Sebagaimana disampaikan oleh Charles Greer (2005), bahwa perencanaan strategis juga disebut formulasi strategi, yang dapat dibedakan antara rasionalitas dan formalitasnya.

Dalam perencanaan tersebut harus diselaraskan dengan Prinsip dan nilai *Affirmative Action* untuk menjembatani masalah sosial budaya yang muncul, sekaligus menjamin representasi dan proporsi SDM secara ideal di karakteristik kependudukan, geografi, dan budaya masyarakat pada organisasi, baik publik atau privat (Gomez, 2003). Dengan kebijakan afirmasi, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah minat pendaftar calon anggota Polri dari OAP untuk berpartisipasi selama perekrutan dan seleksi calon anggota Polri oleh Biro SDM Polda Papua. Dalam rangka seleksi penerimaan Pra Bintang Noken T.A. 2020 guna

mendapatkan calon- calon Bintara Polri khusus dari wilayah Papua dan Papua barat yang berkualitas, unggul dan kompetitif, akan dilaksanakan Binlat Pra Bintara Noken Polri T.A. dengan tahapan kegiatan sebagaiberikut :

1. Pembuatan Visi dan Misi berupa (a) Tujuan Pembinaan dan Pelatihan yaitu membentuk karakter individu yang berwawasan kebangsaan calon Bintara putra asli daerah Papua dan Papua Barat yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila dan mampu mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di wilayah Papua dan Papua Barat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keutuhan NKRI. Kemudian menyiapkan peserta binlat Pra Bintara Noken Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2020, untuk mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2020 yang berkualifikasi dan unggul untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern dan terpercaya. (b) Profil Lulusan pembinaan dan pelatihan, yaitu warga negara Indonesia yang mempunyai pandangan terhadap diri sebagai bangsa Indonesia dan Tanah Air Indonesia sebagai satu kesatuan NKRI yang dijiwai jati diri bangsa. Kemudian calon siswa pendidikan pembentukan Pra Bintara Polri Tahun Anggaran 2020 yang mampu mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri dan menjadi panutan bagi siswa pembentukan Bintara Polri.
2. Penyiapan tenaga pengajar instruktur melalui kegiatan Binlat TOT (*Trainer Of Trainer*) dari Tim Mabes Polri kepada para calon instruktur dari Polda Papua, SPN Polda Papua dan Polda Papua Barat pada ahir Juli 2020 lalu. Dalam pelaksanaan TOT Binlat Pra Bintara Noken memiliki tujuan untuk memberikan materi pelatihan karakter kebangsaan dan praktek pengajaran sesuai dengan kurikulum dan modul kepada para calon instruktur Binlat Pra Bintara Noken Polri dalam penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2020. Tenaga Pendidik / Instruktur yang mengikuti TOT adalah personel dari Polda Papua, Polda Papua Barat, dan SPN Polda Papua dengan rincian :Polda Papua 8 (delapan) orang, Polda Papua Barat 10 (sepuluh) orang dan SPN Polda Papua 22 (dua puluh dua )
3. Penyiapan lokasi dan sarana prasarana, yaitu (a) Lokasi SPN Polda Papua dan (b) Sarana prasana adalah perlengkapan perorangan seperti seragam sepatu dan lain sebagainya dan juga perlengkapan belajar mengajar seperti white board, spidol, dan lain sebagainya yang dipersiapkan dari SPN Polda Papua.
4. Pelaksanaan. Dalam kegiatan Binlat ini dilakukan upaya untuk menghilangkan pemahaman eksklusivitas merujuk pada sikap eksklusif yang ada di OAP. Fungsi sikap antara lain digunakan dalam membantu individu memahami dunia sekelilingnya dengan mengorganisasikan dan menyederhanakan masukan yang sangat kompleks dari lingkungan dan membantu individu untuk menyesuaikan diri dalam dunia yang kompleks dengan membuat individu cenderung bertindak laku tertentu yang diterima oleh lingkungannya untuk memaksimalkan ganjaran positif dari lingkungannya.

Upaya tersebut melakukan dengan cara (1) Tahap Pembentukan Dasar dan Kepribadian Pembentukan Dasar dengan melakukan penanaman nilai-nilai luhur dan karakter yang diwujudkan dalam olah hati, olah raga, olah pikir, dan olah karsa melalui perubahan pola pikir (Mind Set). Kepribadian adalah merupakan tahap pengenalan diri sebagai individu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun sebagai bagian rakyat Indonesia. Tahap ini juga sekaligus sebagai konsep diri yang akan menjadi bagian dari anggota keluarga, masyarakat dan lingkungannya yang mengedepankan hubungan dan interaksi dengan orang lain sebagai bagian dari Masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Tahap Pengembangan Diri yaitu memberikan pembekalan kepada peserta agar memiliki interpersonal skill, kreatif dan inovatif, berupa pemahaman media sosial dan internet dan bagaimana memanfaatkannya untuk pelayanan masyarakat. tahapan pemberian motivasi dan inspirasi agar percaya diri menjadi warga negara yang bijaksana dalam menjalankan hidup sehari-hari. (3) Tahap Pemantapan dengan melakukan pemberian pengalaman belajar dalam

bentuk latihan kerja langsung di masyarakat dengan melakukan belanja masalah atau mencari masalah yang terjadi di lingkungan terdekat dan melakukan bakti sosial serta ceramah pembekalan yang merupakan rangkuman dari semua mata pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya (Michael D. Whit and Gipsy Escobar, 2015).

Selanjutnya (Nuryanti, 2014) menyebutkan wawasan kebangsaan melahirkan suatu paham kebangsaan atau nasionalisme yang mencerminkan pikiran-pikiran yang bersifat nasional. Setiap bangsa seharusnya memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional. Melalui wawasan kebangsaan, masyarakat Indonesia dapat merasakan cinta terhadap negara Indonesia. Dalam kegiatan Binlat dilakukan upaya untuk memperkuat paham kebangsaan para calon peserta didik yaitu dengan melakukan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Bendera Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan, yang harus dimiliki setiap bangsa Indonesia agar mencintai tanah air Indonesia yang dijiwai jati diri bangsa dan menjadi SDM yang unggul di era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

Persoalan mendasar pendidikan karakter para putra Papua adalah ketika mereka belum merasa orang asli Indonesia. Bahwa Papua bagian kebhinekaan Indonesia. Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diakui ataupun tidak, masih ada sebagian kecil orang Papua yang minta memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan ada paradigma pada sebagian masyarakat Papua jika orang-orang pendatang yang berkulit sawo matang dan berambut lurus adalah penjajah. Tidak dipungkiri pemahaman bahwa Papua beda dengan Indonesia ini benar-benar masih ada pada diri siswa Pra Bintara Noken Polri pada awal proses Binlat. Untuk itu berbagai upaya dan doa dilakukan bagaimana menyadarkan hal itu.

Upaya pertama melalui afirmasi alam bawah sadar yang sejak awal diulang-ulang oleh para pengajar yang selalu mengajak untuk bersama-sama mengikrarkan kalimat. "Saya orang Indonesia, wajib cinta tanah air Indonesia." Selain itu juga salam dan yel-yel "Satu hati untuk Indonesia" yang diucapkan setiap kali pertemuan, baik pagi, siang, sore hingga malam. Masih terkait afirmasi alam bawah sadar, usaha lain yang terus dilakukan adalah melalui upacara Afirmasi Cinta Tanah Air Membentuk karakter pemuda Papua diawali dengan penyadaran jiwa, agar mereka benar-benar merasa orang Indonesia dan bangga sebagai orang Indonesia. Di dalam apel pagi itu dilakukan pengibaran bendera sang merah putih yang dilaksanakan setiap hari sekaligus dibaca secara bersama-sama. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda dan Tribrata. Bahkan menjelang bangun tidur dan ketika akan tidur setiap hari juga diputarkan lagu-lagu Nasional. Ada satu lagi masih terkait afirmasi alam bawah sadar, guna menumbuhkan kesadaran anak-anak Papua sebagai orang Indonesia asli adalah melalui Mars Banoken yang diciptakan oleh Karo SDM Polda Papua. Lirik dalam Mars Banoken itu adalah kalimat-kalimat ungkapan jiwa merah putih, bahkan yang leleh hebat lagi adalah pembuatan film Banoken.

Seiring dengan usaha penyadaran melalui afirmasi alam bawah sadar, usaha selanjutnya adalah dengan pengertian alam sadar. Pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia yang besar dan membanggakan, Pengetahuan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia gigih dan menginspirasi, kemudian diskusi tentang sejarah, presentasi soal pemahaman nilai-nilai sejarah juga pemutarana film sejarah bangsa Indonesia. Tidak berhenti di sini, usaha penyadaran sebagai orang Indonesia asli juga dilakukan dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa setiap hari sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Kemudian metode Pelatihan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Binlat ini adalah (1) *Experiential Learning* Suatu proses pembelajaran yang melibatkan setiap peserta kedalam aktivitas kekinian dan menantang yang didesain berdasarkan program pembinaan di mana peserta akan terlibat secara aktif untuk memperoleh nilai-nilai dan inspirasi di dalam program yang terstruktur, yang tujuannya memberikan pengalaman praktis, langsung dan bersifat “bottom up” sehingga menjawab bagaimana peserta dapat menerapkan nilai-nilai yang diharapkan di dalam kehidupannya; membuat refleksi pembelajaran dari pengalaman praktis yang dialami; menghubungkan relevansi nilai-nilai dan terobosan (breakthrough) yang diperoleh peserta dari proses refleksi tersebut di atas; menerapkan aplikasi pembelajaran dari proses berpikir dalam konsep yang dihubungkan dengan teori (bila ada) dengan merangsang pengembangan kemampuan berfikir peserta secara kreatif dan menyeluruh. (2) Metode Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pelajaran yang dilakukan dengan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta, yang bertujuan agar peserta secara proaktif mendengar informasi secara terstruktur; Peserta menyerap mata pelajaran yang diberikan; peserta ditantang untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami; peserta berdiskusi tentang permasalahan yang diberikan untuk dipecahkan bersama; peserta terbiasa mengadakan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan suatu masalah. (3) *Neuro Linguistic Programming* salah satu metoda pembelajaran yang mengaktifkan kekuatan otak sadar maupun tidak sadar (*conscious dan subconscious Mind*) dengan menggunakan bahasa (*linguistic*) dalam urutan proses mental (*programming*) yang berpengaruh atas perilaku untuk menciptakan makna yang positif dan konstruktif pada kehidupan kita.

Setelah mendapatkan Pendidikan Karakter Kebangsaan dengan pola pembinaan dan pelatihan sebagaimana dituliskan diatas kemudian dilakukan kegiatan penilaian untuk mengetahui sejauh mana kedalaman peserta didik dalam menerima pelajaran yang diberikan dengan cara (1) proses pengumpulan dan pelaporan data hasil belajar peserta yang mencakup aspek kemampuan dasar, sikap mental / kepribadian, dan hasil kesamaptaaan jasmani peserta (2) Penilaian aspek kemampuan dasar penilaian yang dilaksanakan secara terpadu terhadap tugas-tugas peserta, pengamatan terhadap kinerja dan hasil tes tertulis, observasi serta hasil latihan teknis. (3) Penilaian aspek mental dan karakter penilaian yang dilaksanakan melalui pengasuhan terhadap sikap mental dan penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan peserta yang dilaksanakan dalam bentuk pengamatan terhadap aspek kepribadian secara berkelanjutan, akurat dan konsisten.

Kemudian Observasi penilaian yang dilakukan tanpa diketahui oleh peserta tentang disiplin, sikap dan perilaku selama dalam pembinaan dan pelatihan. (1) Evaluasi, Monitoring dan Implementasi. Selama pelaksanaan kegiatan Binlat dilakukan proses evaluasi pada awal pelatihan dengan melakukan pemetaan nilai-nilai yang dimiliki peserta untuk melihat sampai sejauh mana tingkat wawasan kebangsaan peserta. Evaluasi akan dilakukan secara bertahap yaitu (a) Tahap 1 dilaksanakan pada saat selesai Binlat Pra Bintara Noken; (b) Tahap 2 dilaksanakan pada saat Bintara Noken selesai melaksanakan pendidikan Pembentukan Bintara; (c) Tahap 3 dilaksanakan setelah Bintara bertugas selama 1 tahun. Selain proses evaluasi kemudian juga dilakukan proses monitoring yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu (1) Monitoring pada saat Binlat Pra Bintara Noken berlangsung yang akan dilakukan oleh pengawas yang langsung melekat pada setiap regu. (2) Monitoring pada saat pendidikan Bintara Noken yang dilakukan oleh pelatih. (3) Monitoring selama satu tahun Bintara Noken bertugas yang dilakukan oleh atasan masing-masing.

Setelah selesai Binlat Pra Bintara Noken para peserta diberi tugas mengaktualisasikan apa yang telah didapat kepada masyarakat atau lingkungan terdekatnya selama 1 (satu) minggu sampai Pendidikan Pembentukan Bintara Polri dimulai dan Evaluasi serta Monitoring dilaksanakan oleh tim kecil yang independen. Selanjutnya para peserta didik kemudian

diberikan pembinaan dan pelatihan jasmani dan akademik untuk dipersiapkan mengikuti seleksi Pendidikan Bintara Polri T.A. 2020.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan fakta-fakta dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Rekrutmen Polri yang mengakomodir implementasi kebijakan afirmasi dan sekaligus menguatkan karakter kebangsaan para peserta Pendidikan Polri yang berasal dari OAP di Polda Papua maka harus dilakukan suatu langkah inovasi dengan melaksanakan program Binlat yaitu Program Bintara Noken, sebelum pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara Polri. Pemberian Binlat ini sebagai bekal utama bagi adik-adik pelajar dari OAP yang akan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. Program ini dilaksanakan dengan memberikan materi-materi pembekalan yang berisi tentang Pendidikan karakter yang berdasarkan rasa wawasan Teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa, rasa wawasan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, rasa wawasan Pancasila, rasa wawasan Pembukaan UUD 1945, rasa wawasan Bhinneka Tunggal Ika, rasa wawasan Lambang Negara dan Sang Merah Putih. Dengan adanya pelaksanaan program ini maka para peserta Binlat yang nantinya akan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri dari OAP akan memiliki karakter kebangsaan dan rasa nasionalisme yang tinggi sebagai modal dasar pembentukan personil Polri yang cinta terhadap Tanah Air yang akan menjadi ujung tombak Pemerintah khususnya Polri dalam menumpas Gerakan Separatisme di tanah Papua

Tujuan program Binlat Pra Bintara Noken T.A. 2020 yang dilakukan oleh SSDM Polri dapat tercapai yaitu adanya implementasi kebijakan afirmasi dalam rangka meningkatkan partisipasi orang asli Papua (OAP) untuk menjadi anggota Polri yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Program ini juga merupakan bentuk kepedulian Polri dan elemen masyarakat pencinta Tanah Air dalam menjawab tantangan tentang rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme di kalangan OAP. Sehingga, diharapkan dengan dilaksanakannya program Binlat Pra Bintara Noken T.A. 2020 maka kelak akan dapat menghasilkan personil-personil Polri yang memiliki wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme yang dapat menjadi agen-agen perubahan sikap eksklusivitas di komunitas OAP. Program ini juga bertujuan untuk membangun karakter pemuda Papua. Karakter yang dimaksudkan adalah karakter nasionalis yang dapat menangkal paham separatis yang menentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program Binlat Pra Bintara Noken Polri Tahun Anggaran 2020 dapat diselenggarakan dengan aman dan lancar serta menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Suksesnya pelaksanaan Binlat karena dukungan semua pihak, khususnya dari Biro SDM Polda Papua dan Papua Barat, SPN Polda Papua yang diwakili oleh Ka SPN, Kabagjarlat, Kakorgadik, Kakorsis, Pengasuh, Instruktur, Logistik, Admin dan seluruh Jajaran SPN Polda Papua, selanjutnya pihak SSDM Polri yang sudah memberikan arahan-arahan pokok yang berkaitan dengan Kurikulum dan Modul serta monitoring anggaran serta mengirim Tim Pelatih khususnya untuk Sesi Pengkondisian dan Pengawasan kelancaran Sesi Pemantapan sampai dengan Modul dan Kurikulum Karakter Bangsa.

Pendidikan karakter Kebangsaan yang dilakukan dalam program Binlat Pra Bintara Noken T.A. 2020 merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan serta penyelenggaraan program Binlat guna mengantarkan peserta didik dalam memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa peserta didik adalah sebagai generasi bangsa dari OAP yang harus

memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya. Dengan adanya Pendidikan Karakter Kebangsaan yang diberikan sebelum menempuh Pendidikan Bintara Kepolisian diharapkan dapat membekali peserta didik untuk memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam hal penguasaan, penerapan dan pengembangan ilmu Kepolisian dengan rasatanggung jawab dan bermoral.

### Saran

Peserta didik diharapkan pada saat nanti dinyatakan lulus Pendidikan Bintara Kepolisian akan mampu untuk menjaga dan meneruskan cita-cita pembangunan bangsa dan dengan sungguh-sungguh mencintai bangsanya sendiri, dengan tidak membedakan setiap suku, ras, maupun agama yang mendiami di bumi pertiwi Indonesia khususnya yang ada di daerah Papua. Dengan wawasan kebangsaan dan juga semangat nasionalisme maka hal ini diharapkan para peserta didik dapat menjadi agen-agen kepolisian yang berwawasan dan berkarakter Kebangsaan yang mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Negara Indonesia agar tidak terpecah belah. Diharapkan para Bintara Noken asli putra Papua inilah yang akan menjadi agen-agen cinta NKRI yang bisa membawa perubahan Papua lebih baik. Perubahan mindset ini menitik beratkan pada pembangunan mental spiritual kebangsaan, manunggalnya keimanan dan kamanusiaan berlandaskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

### Pengakuan

Prof. DR. NURLIAH NURDIN, S.SOS, MA, Andyka Kusuma, Dr. HAMKA,MA, Orangtua, Istri Saya Mulia desi septiarani dan rekan-rekan lainnya untuk bantuan dalam proses pembuatan Jurnal ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Making good cops in the twenty-first century: Emerging issues for the effective recruitment, selection and training of police in the United States and abroad. (2015). *International Review of Law Computers & Technology*, Vol. 22, Nos. 1–2.
- Baedhowi. (2017). Revitalisasi Sumber Daya Aparatur dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Publik. *urnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.15, No.2.
- Dwaa, Noach Hendrik Daud. (2020). Implementasi Affirmative Action Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Bintara Polri Di Polda Papua 2019. *Publikauma Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 40-49. DOI: 10.31289/publika.v8i1.3621. .
- Harianja, Ayunita. (2020). *Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua*. Papua Indonesia: <http://www.pskp.or.id/2020/09/17/separatisme-penyebab-munculnya-konflik-di-papua/>. .
- Harianja, Ayunita. (2020). Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua *Jurnal Ilmu Pendidikan UNM*, 9 (1).
- Kemendiknas. (2015). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.

- Lukum, Roni. (2020). Upaya Peningkatan Pemahaman Wawasan Nusantara sebagai Sarana dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal UNG*, 01.
- Mahifal. (2015). Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan. *urnal Pedagogia FKIP Universitas Pakuan.*, 2231806. .
- Michael D. Whit and Gipsy Escobar. (2015). Making good cops in the twenty-first century: Emerging issues for the effective recruitment, selection and training of police in the United States and abroad. *International Review of Law Computers & Technology*, Vol. 22, Nos. 1–2.
- Nuryanti. (2014). Penanaman Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Melalui Pembelajaran Sejarah. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, No 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). *Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. .
- Pravitri Retno. (2019). *Kondisi Terkini Kerusuhan Di Papua, Aksi Anarkis Berlanjut assa Bakar Fasilitas Umum*. Jakarta: Trubunnews.com.
- Rivai, Veithzal. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dan Teori dan Praktik*. Yogyakarta : PT Raja Grafindo.
- Siagian, Sondang P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofyan, FS. dan D. Sundawa. (2015). Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24 (2), 185-198.
- Tabuni, Depinus, Rumapea, Patar, & Areros. (2018). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Studi Kasus Tentang Pelayanan Publik Bidang Pendidikan) Di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua. *Sam Ratulangi University*, 01.
- A., Doni Koesoema. 2007. *Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press
- Data Biro SDM Polda Provinsi Papua (2019)
- Daulay, Anwar Saleh. 2002. Pendidikan Humaniora Untuk Mengembangkan Wawasan Kemanusiaan dan Kebangsaan. *Jurnal Ilmu Pendidikan UNM*, 9 (1). <http://dx.doi.org/10.17977/jip.v9i1.464>
- Decenzo, David A. and Stephen P. Robbins. 2002. *Human Resource Management*. New Jersey: John Wiley & Sons.

- Dwaa, Noach Hendrik Daud. 2020. Implementasi Affirmative Action Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Bintara Polri Di Polda Papua 2019. *Publikauma Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 40-49. DOI: 10.31289/publika.v8i1.3621.
- Gatewood, R. and Field, H. 2001. *Human Resource Selection*. Orlando: Harcourt Brace & Company.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Andi Offset.
- Greer, Charles R. 2005. *Strategic Human Resource Management, Second Edition*. New York: Pearson College.
- Handoko. T. Hani. 2009. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Harianja, Ayunita. 2020. *Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua*. <http://www.pskp.or.id/2020/09/17/separatisme-penyebab-munculnya-konflik-di-papua/>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 19.00 WIB.
- Irawan dan Basu Swastha DH. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta : Liberty Offset.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Fisip Universitas Indonesia.
- Kemendiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kepolisian Republik Indonesia. 2019. Keputusan Kapolri Nomor: KEP/2513/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penyelenggaraan Rekrutmen Pra Bintara Noken Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri T.A. 2020. Jakarta: Mabes Polri.
- Khan, Yahya. 2010. *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri*. Yogyakarta: Pelangi Publishing.
- Lazuardi, A.S. 1996. *Sebuah Catatan Sudut Pandang Siswono tentang Nasionalisme dan Islam*. Jakarta: Citra Media.
- Lickona, Thomas. 1992. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Lukum, Roni. 2013. *Upaya Peningkatan Pemahaman Wawasan Nusantara sebagai Sarana dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme bagi Warga Negara Indonesia*. <http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/77/upaya-peningkatanpemahaman-wawasan-nusantara-sebagai-sarana-dalam-meningkatkan-semangatnasionalisme-bagi-warga-negara-indonesia.pdf>. diakses 20 Desember 2020.
- Mahifal. 2011. Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Pedagogia FKIP Universitas Pakuan*. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2231806](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2231806).
- Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: ESIS.

- Mathis, Robert L. and John H. Jackson. 2001. *Human Resource Management (edisi 10)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Miller, Edwin Leroy, Elmer H. Burack, and Maryann H. Albrech. 1980. *Management of Human Resources*. Michigan: Prentice-Hall.
- Nawawi, Hadari. 2008. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nuryanti. 2014. *Penanaman Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Melalui Pembelajaran Sejarah*. Majalah Ilmiah Pawiyatan, No 1, Hal 129.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Purnamasari, Deti Mega. 2020. *Tuduhan Vanuatu soal Papua dan Pembelaan Indonesia di Sidang PBB*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/09204201/tuduhan-vanuatu-soal-papua-dan-pembelaan-indonesia-di-sidang-pbb?page=all>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.
- Rahmanto dan Yani. 2015. Pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Universitas Negeri Surabaya Tentang Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(3), 1369–1381. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/13158>.
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketiga belas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sofyan, FS. dan D. Sundawa. 2015. Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24 (2), 185-198.
- Sofyandi, Herman. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tabuni, Depinus, Patar Rumapea, William A. Areros. Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Studi Kasus Tentang Pelayanan Publik Bidang Pendidikan) Di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik, Universitas Sam Ratulangi*, 1 (043). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17060>

- Timpe, A. Dale. 2003. *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Triandis, H. C. 1971. *Attitude and Attitude Change (Foundations of Social Psychology)*. New Jersey: John Wileys & Sons Inc.
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Persada.
- w., Pravritri Retno. 2019. *Kondisi Terkini Kerusuhan Di Papua, Aksi Anarkis Berlanjut, Massa Bakar Fasilitas Umum*.  
<https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/29/kondisi-terkini-kerusuhan-di-papua-aksi-anarkis-berlanjut-massa-bakar-fasilitas-umum>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.00 WIB.
- Welianto, Ari. 2020. *Timor Leste: Negara Bekas Bagian Indonesia*.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/07/180000769/timor-leste-negara-bekas-bagian-indonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 11.00 WIB.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral Dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan Mengagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual Dan Futuristik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.